

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DI NEGARA BERKEMBANG

Studi Kasus Indonesia Menuju 2045

Rudy C Tarumingkeng



*Rudy C Tarumíngkeng: Kepemimpinan Transformasional di Negara
Berkembang - Studi Kasus Indonesia Menuju 2045*

Professor of Management NUP: 9903252922
Rector, Cenderawasih State University, Papua (1978-1988)
Rektor, Krida Wacana Christian University, Jakarta (1991-2000)
Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)
Data Analyst, Concurrently Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta

URL: <https://rudyclt.com/ab/Buku-Artikel-rudyclt-23-24.htm>

© RUDYCT-e-Academic-Series

rudyclt75@gmail.com

Bogor, Indonesia

21 October 2025

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DI NEGARA BERKEMBANG: STUDI KASUS INDONESIA MENUJU 2045

Pendahuluan: Paradigma Baru Kepemimpinan di Dunia Berkembang

Kepemimpinan di negara berkembang, khususnya Indonesia, menghadapi kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara maju. Kompleksitas ini muncul dari perpaduan antara **tantangan struktural** (seperti kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi), serta **tantangan transformatif** (seperti disrupsi digital, perubahan iklim, dan globalisasi). Dalam konteks tersebut, muncul kebutuhan mendesak terhadap **kepemimpinan transformasional** — suatu model kepemimpinan yang tidak hanya mengelola perubahan, tetapi juga **menginspirasi perubahan**.

Kepemimpinan transformasional (Transformational Leadership) diperkenalkan secara sistematis oleh **James MacGregor Burns (1978)** dan dikembangkan oleh **Bernard Bass (1985)**. Konsep ini menekankan pada transformasi nilai, visi, dan kesadaran moral baik pada pemimpin maupun pengikut. Dalam konteks negara berkembang, teori ini menjadi sangat relevan karena pembangunan bukan sekadar proses ekonomi, tetapi juga **transformasi sosial dan moral bangsa**.

Menuju Indonesia Emas 2045, bangsa ini ditantang untuk melampaui sekadar pertumbuhan ekonomi menuju **pembangunan inklusif dan berkelanjutan**. Artinya, kepemimpinan nasional dan daerah perlu mengintegrasikan visi strategis dengan kemampuan adaptif terhadap dinamika teknologi, lingkungan, dan sosial budaya.

Bab I. Konsep Kepemimpinan Transformasional

1.1 Definisi dan Karakteristik Utama

Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada **inspirasi, motivasi, dan pembentukan makna**. Pemimpin transformasional mampu mengubah paradigma berpikir bawahan melalui visi yang kuat dan nilai-nilai luhur. Bernard Bass mengidentifikasi empat komponen utama yang dikenal sebagai **“The Four I’s”**:

1. **Idealized Influence (Pengaruh Ideal)** – pemimpin menjadi teladan moral dan etika.
2. **Inspirational Motivation (Motivasi Inspiratif)** – pemimpin mengartikulasikan visi yang menarik dan bermakna.
3. **Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual)** – pemimpin mendorong kreativitas dan berpikir kritis.
4. **Individualized Consideration (Pertimbangan Individual)** – pemimpin memperhatikan kebutuhan unik setiap individu.

Dalam konteks negara berkembang, empat dimensi ini berfungsi sebagai peta jalan moral dan strategis bagi pemimpin publik maupun korporat.

1.2 Perbedaan dengan Kepemimpinan Transaksional

Kepemimpinan transaksional menekankan pada **pertukaran imbalan dan hukuman**, sedangkan kepemimpinan transformasional menekankan pada **perubahan nilai dan kesadaran**. Jika kepemimpinan transaksional

mempertahankan sistem yang ada, kepemimpinan transformasional **menciptakan sistem baru yang lebih manusiawi dan adaptif.**

Di Indonesia, transisi dari kepemimpinan transaksional menuju transformasional tampak dalam berbagai reformasi — baik birokrasi, pendidikan, maupun sektor BUMN. Namun, proses ini masih berjalan parsial dan sering terhambat oleh budaya hierarkis serta kepentingan politik jangka pendek.

Bab II. Konteks Negara Berkembang: Dinamika dan Tantangan

2.1 Kompleksitas Struktural

Negara berkembang seperti Indonesia menghadapi masalah multidimensi: kemiskinan, korupsi, ketimpangan regional, serta kelemahan institusional. Kondisi ini menuntut pemimpin yang **bukan hanya administratif, tetapi visioner dan etis.**

Sebagai contoh, **reformasi birokrasi pasca-1998** menuntut perubahan pola pikir (mindset) dari “penguasa” menjadi “pelayan publik.” Namun perubahan struktural tanpa kepemimpinan moral tidak menghasilkan transformasi sejati. Di sinilah kepemimpinan transformasional memainkan peran penting dalam menumbuhkan nilai **integritas, empati, dan tanggung jawab publik.**

2.2 Tantangan Globalisasi dan Teknologi

Revolusi Industri 4.0 telah mempercepat arus perubahan di sektor ekonomi dan sosial. Negara berkembang yang tidak siap menghadapi disrupsi teknologi akan tertinggal dalam hal produktivitas, inovasi, dan daya saing.

Pemimpin transformasional di Indonesia harus mampu:

- **Mengintegrasikan teknologi dengan nilai kemanusiaan,**
- **Mendorong pembelajaran sepanjang hayat,**

- **Membangun kolaborasi lintas sektor** antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil.

Bab III. Evolusi Kepemimpinan di Indonesia

3.1 Era Orde Lama hingga Reformasi

Kepemimpinan Soekarno (1945–1966) mencerminkan gaya **transformasional ideologis**: penuh karisma, retorika, dan semangat kebangsaan. Namun, idealisme tersebut tidak diimbangi dengan stabilitas ekonomi.

Kepemimpinan Soeharto (1966–1998) lebih bersifat **transaksional-paternalistik**, berorientasi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Transformasi terjadi secara material, tetapi tidak disertai demokratisasi politik.

Pasca-1998, muncul kepemimpinan plural dan demokratis, seperti Gus Dur, Megawati, dan SBY, yang menekankan reformasi institusional dan good governance.

3.2 Kepemimpinan di Era Jokowi

Presiden Joko Widodo memperlihatkan karakter **kepemimpinan transformasional pragmatis**: fokus pada pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan pemerataan. Melalui visi **“Indonesia Maju 2045”**, Jokowi berupaya menggeser paradigma pembangunan dari *resource-based economy* menuju *innovation-driven economy*.

Namun, transformasi ini membutuhkan kesinambungan. Setelah 2024, Indonesia memerlukan pemimpin yang mampu melanjutkan semangat “kerja, kolaborasi, dan keadilan sosial” dengan fondasi etika yang kuat dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Bab IV. Kepemimpinan Transformasional dalam Politik Pembangunan

4.1 Visi Nasional dan Transformasi Sosial

Pemimpin transformasional harus memiliki **visi jangka panjang yang melampaui masa jabatan politik**. Dalam konteks Indonesia, visi 2045 menjadi panduan makro bagi seluruh sektor. Namun, implementasinya bergantung pada sejauh mana pemimpin nasional dan daerah dapat menginternalisasi visi tersebut dalam kebijakan nyata.

Sebagai contoh, **Transformasi Ekonomi Hijau (Green Economy)** memerlukan pemimpin daerah yang mampu mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pemimpin seperti ini tidak sekadar mengejar investasi, tetapi menumbuhkan kesadaran ekosistem pembangunan berkelanjutan.

4.2 Good Governance dan Akuntabilitas

Kepemimpinan transformasional menuntut **transparansi dan akuntabilitas publik**. Good governance bukan hanya jargon administratif, tetapi fondasi moral. Seorang pemimpin yang transformasional mampu menyeimbangkan antara **efisiensi ekonomi dan keadilan sosial**, antara **hasil (outcome)** dan **proses (integrity)**.

Kasus sukses misalnya terlihat pada praktik **open government** di beberapa pemerintah daerah seperti Bandung (era Ridwan Kamil) dan Banyuwangi (era Azwar Anas), di mana transparansi digital menjadi alat transformasi budaya birokrasi.

Bab V. Kepemimpinan Transformasional dan Pembangunan SDM

5.1 SDM sebagai Kunci Transformasi

Kepemimpinan transformasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari agenda **penguatan sumber daya manusia (SDM)**. Visi 2045 menempatkan SDM unggul sebagai prasyarat utama menuju negara maju.

Pemimpin transformasional harus berperan sebagai:

- **Visioner:** merumuskan arah pembelajaran nasional yang adaptif terhadap AI dan digitalisasi,
- **Inspirator:** membangkitkan semangat belajar sepanjang hayat,
- **Motivator:** menciptakan iklim inovasi di lembaga pendidikan dan industri.

5.2 Studi Kasus: Program “Merdeka Belajar”

Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) adalah wujud transformasi pendidikan yang sejalan dengan nilai kepemimpinan transformasional. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menjadi contoh pemimpin generasi baru yang mendorong **disrupsi sistem pendidikan tradisional** menuju sistem yang berbasis kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi.

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana **visi, inspirasi, dan inovasi** dapat menjadi alat kepemimpinan transformasional dalam konteks kebijakan publik.

Bab VI. Kepemimpinan Transformasional dan Pembangunan Ekonomi

6.1 Ekonomi Digital dan UMKM

Transformasi digital merupakan jantung dari perekonomian Indonesia masa depan. Pemimpin transformasional harus mampu menciptakan kebijakan yang **mendukung digitalisasi inklusif**, terutama untuk sektor UMKM.

Program seperti **Gerakan Nasional 1000 Startup Digital** dan **Digital Talent Scholarship** adalah contoh bagaimana pemerintah berperan sebagai fasilitator ekosistem inovasi. Kepemimpinan yang adaptif terhadap teknologi ini memungkinkan Indonesia mempercepat transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).

6.2 Pembangunan Berkelanjutan dan ESG

Pemimpin transformasional tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga **keberlanjutan (sustainability)**.

Indonesia telah menetapkan **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045** yang berorientasi pada green growth dan low-carbon economy.

Pemimpin nasional maupun daerah harus memastikan bahwa investasi yang masuk bukan sekadar menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga **beretika terhadap lingkungan dan sosial**.

Bab VII. Kepemimpinan Transformasional dan Reformasi Birokrasi

7.1 Membangun Budaya Etika dan Pelayanan

Reformasi birokrasi di Indonesia belum akan berhasil jika tidak didukung oleh **kepemimpinan moral dan teladan**. Pemimpin transformasional menanamkan nilai-nilai integritas dan pelayanan publik, bukan sekadar menegakkan aturan.

Transformasi ASN (Aparatur Sipil Negara) menuju “Smart Bureaucracy” adalah contoh nyata. Sistem digital (e-government) meningkatkan efisiensi, tetapi tanpa integritas, sistem itu bisa disalahgunakan. Oleh karena itu, kepemimpinan harus menekankan **etika dan tanggung jawab pelayanan**.

7.2 Studi Kasus: Banyuwangi dan Bandung

Kabupaten Banyuwangi dikenal dengan *Smart Kampung* — model kepemimpinan berbasis digital inklusif. Sedangkan Bandung mengusung prinsip **co-creation** antara pemerintah dan warga. Dua contoh ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dapat diterapkan dalam konteks lokal dengan hasil nyata berupa inovasi, partisipasi, dan transparansi.

Bab VIII. Kepemimpinan Transformasional dalam Tata Kelola Demokrasi

8.1 Kepemimpinan Etis dalam Politik

Demokrasi tanpa etika akan menghasilkan **politik transaksional**. Pemimpin transformasional harus menjadi teladan moral di tengah sistem politik yang sarat kepentingan.

Krisis kepercayaan publik terhadap partai politik hanya bisa diatasi dengan **kepemimpinan yang berani melayani, bukan dilayani**. Prinsip “*servant leadership*” menjadi pelengkap bagi kepemimpinan transformasional dalam konteks demokrasi.

8.2 Civil Society dan Partisipasi Publik

Kepemimpinan transformasional juga perlu membangun **masyarakat madani (civil society)** yang aktif, kritis, dan partisipatif. Visi 2045 tidak mungkin tercapai jika rakyat hanya menjadi objek pembangunan.

Kekuatan generasi muda (Gen Z dan milenial) harus dilibatkan dalam proses kebijakan publik melalui ruang dialog digital, inovasi sosial, dan partisipasi politik yang sehat.

Bab IX. Kepemimpinan Transformasional di Era AI dan Disrupsi

9.1 Teknologi sebagai Katalis Transformasi

AI, Big Data, dan IoT telah mengubah cara pemerintah bekerja dan masyarakat berinteraksi. Pemimpin masa depan harus memiliki **kecerdasan digital (digital intelligence)**, namun juga **kecerdasan moral (moral intelligence)** untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kemanusiaan.

Kepemimpinan transformasional di era AI bukan sekadar tentang penguasaan teknologi, tetapi tentang **mengembalikan teknologi kepada nilai-nilai kemanusiaan**.

9.2 Etika, Kepercayaan, dan Akuntabilitas Digital

Pemimpin yang transformasional di era digital harus memastikan bahwa penggunaan teknologi **tidak mengorbankan privasi, keadilan, dan kesetaraan**.

Dengan prinsip **AI for Humanity**, Indonesia dapat menjadi contoh negara berkembang yang memanfaatkan teknologi secara etis dan berkeadilan.

Bab X. Refleksi Menuju Indonesia Emas 2045

10.1 Transformational Leadership as a National Ethos

Menuju 2045, Indonesia memerlukan kepemimpinan transformasional di semua tingkatan — nasional, daerah, komunitas, dan korporat.

Etos kepemimpinan harus bergeser dari *"command and control"* menjadi *"collaborate and co-create"*.

10.2 Moral dan Spiritualitas dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan sejati tidak hanya diukur dari hasil pembangunan, tetapi dari **nilai moral dan spiritual yang diwariskan**.

Transformasi sejati terjadi ketika pemimpin mampu **menyatukan hati, pikiran, dan tindakan** dalam pelayanan publik yang tulus.

Sebagaimana kutipan inspiratif Max DePree:

"The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant."

Refleksi dan Diskusi: Humanizing Leadership for Indonesia 2045

Indonesia membutuhkan pemimpin yang bukan hanya cerdas secara teknokratis, tetapi juga bijaksana secara moral. **Transformational leadership** dalam konteks 2045 adalah tentang *humanizing governance*

— menjadikan manusia bukan alat pembangunan, tetapi tujuan pembangunan itu sendiri.

Kepemimpinan seperti ini menuntut:

- **Kebijakan berbasis nilai, bukan sekadar angka.**
- **Kolaborasi lintas generasi dan sektor.**
- **Penguatan etika publik dalam era AI.**

Dalam bahasa reflektif, kepemimpinan transformasional adalah **perjalanan spiritual bangsa:**

dari kekuasaan menuju pelayanan,
dari kontrol menuju kolaborasi,
dari ambisi menuju kebijaksanaan.

Glosarium

- **Transformational Leadership:** Model kepemimpinan yang menekankan perubahan nilai, motivasi, dan kesadaran moral.
- **Good Governance:** Prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.
- **Servant Leadership:** Gaya kepemimpinan yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan masyarakat.
- **Innovation-Driven Economy:** Perekonomian berbasis inovasi dan pengetahuan.
- **Digital Governance:** Tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.
- **AI for Humanity:** Prinsip etis penggunaan kecerdasan buatan demi kesejahteraan manusia.

Daftar Pustaka

Rudy C Tarumíngkeng: Kepemimpinan Transformasional di Negara Berkembang - Studi Kasus Indonesia Menuju 2045

- Bass, B. M. (1985). *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press.
 - Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
 - Northouse, P. G. (2022). *Leadership: Theory and Practice*. Sage Publications.
 - Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations*. Pearson.
 - Bappenas (2023). *Visi Indonesia 2045 dan RPJPN 2025–2045*.
 - Kompas Research and Development (2024). *Transformasi Ekonomi Indonesia di Era Digital*.
 - Hofstede, G. (2011). *Culture and Organizations: Software of the Mind*. McGraw-Hill.
 - World Bank (2022). *Indonesia Public Sector Reform: Toward Smart Governance*.
 - OECD (2023). *Good Governance Practices for Sustainable Development*.
-



Baik, berikut **elaborasi lengkap bagian “Refleksi dan Diskusi: Humanizing Leadership for Indonesia 2045”** sebagai kelanjutan dari esai *Kepemimpinan Transformasional di Negara Berkembang: Studi Kasus Indonesia Menuju 2045*.

Bagian ini bersifat **reflektif, naratif, dan akademik** — mengintegrasikan unsur etika, sosial, politik, teknologi, dan spiritualitas kepemimpinan.

● REFLEKSI DAN DISKUSI: Humanizing Leadership for Indonesia 2045

1. Paradigma Baru: Dari Kekuasaan Menuju Kemanusiaan

Ketika bangsa Indonesia menuju usia seabad kemerdekaan pada tahun 2045, tantangan utama bukan lagi sekadar **bagaimana menjadi negara maju secara ekonomi**, melainkan **bagaimana menjadi bangsa yang maju secara moral dan kemanusiaan**.

Kepemimpinan di masa depan tidak cukup diukur oleh produk domestik bruto (PDB) atau indeks pembangunan manusia (IPM), tetapi oleh **kedalaman nilai-nilai kemanusiaan** yang tercermin dalam tata kelola dan perilaku sosial.

Kepemimpinan transformasional di abad ke-21 menuntut pergeseran paradigma dari:

- **Power → Service (Kekuasaan menuju Pelayanan)**
- **Control → Collaboration (Kontrol menuju Kolaborasi)**
- **Efficiency → Empathy (Efisiensi menuju Empati)**
- **Growth → Regeneration (Pertumbuhan menuju Regenerasi)**

Dengan kata lain, kepemimpinan yang memanusiakan berarti **mengembalikan manusia ke pusat segala kebijakan** — bukan sebagai alat produksi atau statistik pembangunan, tetapi sebagai makhluk bermartabat dengan potensi spiritual, intelektual, dan sosial.

2. Kepemimpinan sebagai Perjalanan Moral dan Spiritual

Dalam konteks Indonesia, kepemimpinan sejati selalu terkait dengan **nilai-nilai moral dan spiritualitas bangsa**. Pancasila sebagai fondasi etis bukan hanya teks normatif, melainkan *moral compass* dalam setiap tindakan pemimpin.

Transformational leadership dalam bingkai keindonesiaan harus berakar pada:

- **Ketuhanan Yang Maha Esa** → Pemimpin yang menyadari dimensi spiritual tanggung jawabnya.

- **Kemanusiaan yang adil dan beradab** → Pemimpin yang menghormati martabat manusia, termasuk yang berbeda pandangan.
- **Persatuan Indonesia** → Pemimpin yang menolak politik identitas dan menegakkan keadilan sosial.

Dengan demikian, kepemimpinan yang memanusiakan (humanizing leadership) bukan hanya manajemen teknis, melainkan **tindakan etis dan spiritual yang mengangkat harkat bangsa**.

3. Kepemimpinan di Era AI: Antara Efisiensi dan Empati

Transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru bagi kemanusiaan. Pemerintah, korporasi, dan lembaga sosial dihadapkan pada dilema antara **otomasi dan humanisasi**.

Tanpa kepemimpinan yang reflektif, teknologi dapat menjauhkan manusia dari dirinya sendiri — menciptakan efisiensi tanpa makna, produktivitas tanpa hati, dan data tanpa kebijaksanaan.

Humanizing leadership dalam konteks AI berarti:

1. **Menempatkan etika di atas algoritma.**
Teknologi harus tunduk pada prinsip moral, bukan sebaliknya.
2. **Membangun empati digital.**
Pemimpin masa depan perlu memahami dampak emosional dan sosial dari keputusan berbasis data.
3. **Mendorong literasi moral dalam pendidikan teknologi.**
Setiap inovator dan ilmuwan harus memahami bahwa setiap kode dan sistem memiliki konsekuensi etis.

Dengan demikian, visi 2045 tidak hanya berbicara tentang *smart nation*, tetapi juga *wise nation* — bangsa yang cerdas secara digital dan bijaksana secara moral.

4. Kepemimpinan Kolektif dan Ekosistem Kolaboratif

Di masa depan, tidak ada lagi ruang bagi model kepemimpinan tunggal yang heroik. Yang dibutuhkan adalah **kepemimpinan kolektif** — di mana kekuasaan tidak terpusat, tetapi tersebar melalui jejaring kolaborasi.

Kepemimpinan kolektif memerlukan tiga pilar:

- **Trust (Kepercayaan):** Tanpa kepercayaan, kolaborasi hanya menjadi formalitas.
- **Transparency (Transparansi):** Informasi publik harus terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Empowerment (Pemberdayaan):** Pemimpin harus melahirkan lebih banyak pemimpin, bukan pengikut.

Contoh penerapan model ini terlihat dalam inisiatif *smart city* seperti Surabaya dan Semarang, di mana pemerintah menggandeng masyarakat sipil dan sektor swasta dalam proses pengambilan keputusan.

Kepemimpinan kolektif membangun **ekosistem sosial yang berdaya** dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap visi bersama bangsa.

5. Good Governance as Moral Governance

Good governance sering dipahami secara administratif—efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun dalam konteks “humanizing leadership,” good governance harus dimaknai secara lebih dalam sebagai **moral governance**: pemerintahan yang berlandaskan etika, kasih, dan keadilan.

Moral governance mencakup empat aspek utama:

1. **Moral Integrity:** Pemimpin harus menjadi teladan, bukan sekadar regulator.

2. **Moral Accountability:** Tanggung jawab tidak berhenti pada hukum, tetapi juga pada nurani.
3. **Moral Empathy:** Keputusan publik harus mempertimbangkan dampak kemanusiaan, bukan hanya efisiensi fiskal.
4. **Moral Legacy:** Pemimpin meninggalkan nilai, bukan sekadar proyek.

Dengan demikian, reformasi birokrasi sejati bukan hanya perbaikan struktur, tetapi **perubahan jiwa** dari birokrasi itu sendiri — dari mesin administratif menjadi pelayan kemanusiaan.

6. Etika Kepemimpinan dalam Politik dan Pembangunan

Politik pembangunan di Indonesia menuju 2045 menghadapi paradoks: antara visi jangka panjang dan kepentingan elektoral jangka pendek. Pemimpin transformasional dituntut memiliki **moral courage (keberanian moral)** untuk melampaui kalkulasi politik sesaat dan berpihak pada kebenaran serta keadilan.

Etika politik yang memanusiakan harus:

- Menghindari politik uang dan patronase.
- Menjaga kejujuran publik sebagai fondasi demokrasi.
- Menempatkan kebijakan publik sebagai wujud cinta pada rakyat, bukan alat kekuasaan.

Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi kunci. Pemimpin masa depan harus dibentuk melalui sistem pendidikan yang **mengajarkan berpikir kritis, empati sosial, dan tanggung jawab moral**.

7. Membangun Kepemimpinan Multigenerasi

Generasi milenial dan Gen Z adalah pemimpin masa depan Indonesia. Mereka tumbuh dalam dunia digital yang serba cepat, tetapi juga rapuh secara eksistensial. Humanizing leadership harus menjembatani **hikmah generasi tua** dan **energi generasi muda**.

Pendekatan lintas generasi dapat diwujudkan melalui:

- **Mentorship and reverse mentorship:** di mana pemimpin senior belajar dari inovasi generasi muda.
- **Kolaborasi lintas sektor:** antara akademisi, pebisnis, dan aktivis sosial.
- **Dialog lintas budaya dan nilai:** membangun kesadaran global tanpa kehilangan akar lokal.

Kepemimpinan masa depan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi siapa yang paling **mampu berempati dan belajar**.

8. Refleksi Filosofis: Dari Rasionalitas ke Kebijakan

Jika abad ke-20 ditandai dengan rasionalitas ekonomi dan teknologi, maka abad ke-21 menuntut **kebijaksanaan moral dan eksistensial**. Dalam kerangka berpikir ini, kepemimpinan transformasional adalah jembatan antara **akal dan nurani, logika dan cinta, efisiensi dan makna**.

Filsuf Yunani Kuno, Socrates, menekankan bahwa tujuan kepemimpinan sejati adalah *to make souls better*.

Demikian pula dalam konteks Indonesia, kepemimpinan sejati adalah **membuat jiwa bangsa lebih baik** — bukan hanya lebih kaya, tetapi lebih bijak dan berbelas kasih.

9. Humanizing Leadership dan Tantangan Masa Depan

Menuju 2045, Indonesia akan menghadapi beberapa tantangan besar yang membutuhkan kepemimpinan berkarakter humanis:

1. **Disparitas sosial-ekonomi** akibat ketimpangan digital.
2. **Perubahan iklim dan krisis ekologis** yang mengancam keberlanjutan.
3. **Polarisasi politik dan identitas.**
4. **Krisis kepercayaan terhadap institusi publik.**

Kepemimpinan transformasional yang humanis harus menjawab tantangan tersebut dengan strategi moral:

- Mengedepankan **keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian.**
- Membangun **narasi kolektif yang menyatukan, bukan memecah.**
- Menumbuhkan **etika tanggung jawab lintas generasi.**

Dengan demikian, humanizing leadership bukan utopia moral, melainkan **strategi peradaban.**

10. Penutup: Dari Power Menuju Humanity

Refleksi akhir dapat dirangkum dalam satu kalimat:

“Kepemimpinan transformasional adalah perjalanan dari kekuasaan menuju kemanusiaan.”

Perjalanan ini meliputi lima tahap sebagaimana divisualisasikan dalam **infografik “The Moral Arc of Leadership: From Power → Service → Integrity → Wisdom → Humanity.”**

Tahap demi tahap menggambarkan pendewasaan moral pemimpin — dari obsesi akan kontrol menuju panggilan untuk melayani.

Indonesia 2045 akan ditentukan bukan oleh seberapa cepat kita membangun, tetapi **seberapa dalam kita memahami makna membangun.**

Bukan oleh seberapa banyak pemimpin kita miliki, tetapi **seberapa manusiawi kepemimpinan itu dijalankan.**

Sebagaimana pepatah klasik Jawa mengatakan:

"Sepi ing pamrih, rame ing gawe, sugih tanpa banda, digdaya tanpa aji."

Pemimpin sejati tidak mencari kemuliaan pribadi, tetapi meninggalkan jejak kebijaksanaan bagi bangsanya.

Humanizing Leadership for Indonesia 2045

Adalah tentang membangun bangsa yang bukan hanya cerdas dan kompetitif, tetapi juga berbelas kasih, berintegritas, dan bermartabat.

Copilot for this article - Chatgpt 5, Access date: 21 October 2025.
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](https://chatgpt.com/c/68f70549-504c-8322-bae6-77bf3458e4d7))
<https://chatgpt.com/c/68f70549-504c-8322-bae6-77bf3458e4d7>